

KATA PENGANTAR

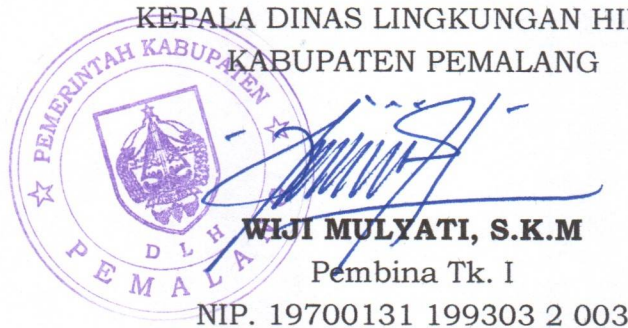
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025. Perubahan Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Bupati Pemalang Nomor : 100.3/760/Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan Renja Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran serta perkiraan capaian pada tahun berjalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025 masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Pemalang, Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



WJJI MULYATI, S.K.M
Pembina Tk. I
NIP. 19700131 199303 2 003

Q. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2021 - 2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025. Perubahan Renja Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yakni “Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan”.

I.2. Landasan Hukum

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya, termasuk pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib kabupaten, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
 29. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 30. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
 31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini adalah sebagai bahan evaluasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

B. Tujuan

- Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja ini adalah sebagai berikut:
- 1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
 - 2. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
 - 3. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
 - 4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup yang efektif dan efisien.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLH Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Selain itu prestasi DLH lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 telah tercantum beberapa indikator kinerja yang harus dicapai DLH Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Pemalang.

Evaluasi Rencana Kerja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025 pada prinsipnya adalah menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025 dan perkiraan target 2025 beserta dengan analisis permasalahannya.

Tabel 2.1
Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Renja pada tabel 2.1 diatas diketahui bahwa realisasi fisik sampai triwulan I tahun 2025 sudah terealisasi 16.58% sedangkan dari anggaran yang terealisasi Rp. Rp. 4.983.118.650,- dari 9 Program. Realisasi program yang Tidak Memenuhi Target Kinerja (rendah dan sangat rendah) terdiri dari 8 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan, hal ini disebabkan karena pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan 2, 3 dan 4 tahun 2025

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SAKIP	nilai	64,01	19.448.266	64,01	19.259.400	64,44	3.787.568	64,44	3.787.568	101	19,67	Tinggi (T)	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	%	100	18.200	100	14.386	33	1.273	33	1.273	33	9	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	14.000	8	10.775	2	1.273	2	1.273	25	12	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	4.200	1	3.611	1	-	1	-	100	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan kelancaran administrasi keuangan	%	100	14.380.634	100	14.378.823	27	3.786.296	27	3.786.296	27	26	Sangat Tinggi (ST)	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	12	14.368.834	12	14.368.834	3	3.786.296	3	3.786.296	25	26	Sangat Tinggi (ST)	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	3.800	1	3.390	1	-	1	-	100	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semestera n SKPD	laporan	1	5.500	1	4.928	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.02.0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	2.500	1	1.671	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	%	1000	295.185	1000	243.907	60	-	60	-	6	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1000	295.185	1000	243.907	60	-	60	-	6	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum perangkat daerah	%	100	398.411	100	266.123	15	59.733	15	59.733	15	22	Rendah ®	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	5.000	2	5.000	0	95	0	95	0	2	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	4.000	1	3.437	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	143.051	3	112.243	0	23.033	0	23.033	0	21	Rendah ®	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	24.360	6	17.052	0	3.554	0	3.554	0	21	Rendah ®	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	12.000	1	12.000	0	3.809	0	3.809	0	32	Sangat Tinggi (ST)	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	200	210.000	200	116.391	32	29.242	32	29.242	16	25	Rendah ®	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	76.968	100	83.463	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	15	15.848	15	15.493	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	61.120	4	67.970	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.910.523	100	3.910.511	23	884.144	23	884.144	23	23	Sangat Tinggi (ST)	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	20	4.632	20	4.620	5	1.500	5	1.500	25	32	Sangat Tinggi (ST)	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	251.609	1	251.609	0	38.948	0	38.948	0	15	Rendah ®	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	3.654.282	1	3.654.282	0	843.696	0	843.696	0	23	Sangat Tinggi (ST)	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	368.346	100	362.187	3	24.744	3	24.744	3	7	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28	89.115	28	78.498	1	23.214	1	23.214	4	30	Sangat Tinggi (ST)	
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	5	1.500	5	1.500	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	265.841	3	265.659	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	11.890	3	16.530	0	1.531	0	1.531	0	9	Rendah ®	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100,00	296.170	100,00	270.682	0,00	2.000	0,00	2.000	0	0,74	Sangat Rendah (SR)	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya Dokumen RPPLH	%	100	200.170	100	180.597	0	1.200	0	1.200	0	1	Sangat Rendah (SR)	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	3	200.170	3	180.597	0	1.200	0	1.200	0	1	Sangat Rendah (SR)	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Dokumen KLHS	%	100	96.000	100	90.085	0	800	0	800	0	1	Sangat Rendah (SR)	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	dokumen	1	96.000	1	90.085	0	800	0	800	0	1	Sangat Rendah (SR)	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	100,00	426.687	100,00	405.724	25,00	-	25,00	-	25,00	0,00	Sangat Rendah (SR)	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	76,78		76,78		66,81				0			
		Indeks Kualitas Air	nilai	75,85		75,85		48,33				0			
		Indeks Kualitas Udara	nilai	84,92		84,92		92,83				0			
		Indeks Kualitas Lahan	nilai	63,32		63,32		50,39				0			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH	%	100	426.687	100	405.724	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	251.687	2	248.381	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	25.000	1	16.047	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim	laporan	1	150.000	1	141.296	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	2	399.700	2	379.060	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100,00	90.000	100,00	84.455	25,00	-	25,00	-	25	0,00	Sangat Rendah (SR)	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100	90.000	100	84.455	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	90.000	1	84.455	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	Persentase Pengendalian B3 & LB3	%	100,00	30.000	100,00	21.023	0,00	-	0,00	-	0	0,00	Sangat Rendah (SR)	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan sementara LB3	%	100	30.000	100	21.023	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	1	30.000	1	21.023	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100,00	24.975	100,00	14.168	8,00	1.000	8,00	1.000	8,00	4	Sangat Rendah (SR)	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	28,00		28,00									
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100	24.975	100	14.168	8	1.000	8	1.000	8	7	Sangat Rendah (SR)	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	25	24.975	25	14.168	2	1.000	2	1.000	8	7	Sangat Rendah (SR)	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100,00	181.313	100,00	137.021	25,00	4.490	25,00	4.490	25	3,28	Sangat Rendah (SR)	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100	181.313	100	137.021	0	4.490	0	4.490	0	3	Sangat Rendah (SR)	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	6	126.588	6	93.780	0	3.390	0	3.390	0	4	Sangat Rendah (SR)	
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	500	54.725	500	43.242	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	4	196.660	4	160.352	0	1.100	0		0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	5.025	100,00	3.025	0,00	-	0,00	-	0	0,00	Sangat Rendah (SR)	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	%	100	5.025	100	3.025	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangan ni	pengadu an	10	5.025	10	3.025	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut	%	82,00	6.073.532	82,00	6.027.932	65,00	1.188.060	0,00	1.188.060	0	19,71	Tinggi (T)	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/ Kota	%	75,00	7.883.532	75,00	9.327.422	75,46	1.188.060	0,00	1.188.060	0	12,74	Rendah ®	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	24	7.883.532	24	9.327.422	6	1.188.060	6	1.188.060	25	13	Rendah ®	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	4	460.000	4	409.299	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	5	930.000	5	2.510.000	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2	420.000	2	380.191	0	-	0	-	0	0	Sangat Rendah (SR)	
2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	85000	6.073.532	85000	6.027.932	9232	1.188.060	9232	1.188.060	11	20	Tinggi (T)	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2025)				Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD		Status Capaian	Keterangan
				Penetapan		Pergseran		I		TOTAL		%			
1	2	3		4		6		7		8		(9=8/6*100)		10	11
		Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					28.982.328		30.062.332		5.951.740						

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perubahan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 dan untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pemalang 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni” yang ditempuh melalui enam misi.

Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Pemalang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Pemalang, maka dapat ditelaah dari Misi ke 6 (enam) yaitu “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan” dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Pemalang yaitu Misi ini ditujukan untuk “mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”.

Selaku Perangkat Daerah yang menunjang urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Pemalang melaksanakan Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup sebesar 69,37 melalui peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R, peningkatan pengelolaan sampah di TPA, penanganan limbah B3, pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin dan penguatan kelompok Masyarakat.

Rencana Kerja dan Pendanaan DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SAKIP	nilai	64,01	64,01	19.448.266.000	19.241.585.230	-206.680.770	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	%	100	100	18.200.000	14.386.220	-3.813.780	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	8	8	14.000.000	10.774.880	-3.225.120	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	4.200.000	3.611.340	-588.660	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan kelancaran administrasi keuangan	%	100	100	14.380.634.000	14.353.508.140	-27.125.860	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	12	12	14.368.834.000	14.343.519.000	-25.315.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	3.800.000	3.389.720	-410.280	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan	1	1	5.500.000	4.928.320	-571.680	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.02.0005	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	1	2.500.000	1.671.100	-828.900	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	%	1000	1000	295.184.500	253.754.120	-41.430.380	
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1000	1000	295.184.500	253.754.120	-41.430.380	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum perangkat daerah	%	100	100	398.411.000	310.039.450	-88.371.550	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	5.000.000	5.000.000	0	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	4.000.000	9.755.000	5.755.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	3	143.051.000	122.957.950	-20.093.050	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	6	24.360.000	17.052.000	-7.308.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1	12.000.000	12.000.000	0	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	200	200	210.000.000	143.274.500	-66.725.500	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	76.967.500	146.863.250	69.895.750	
2.1..01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	1	0	50.000.000	50.000.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	15	15	15.847.500	18.993.250	3.145.750	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	4	4	61.120.000	77.870.000	16.750.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	3.910.523.000	3.802.011.050	-108.511.950	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	20	20	4.632.000	6.120.050	1.488.050	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	251.609.000	251.609.000	0	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									harus diakomodasi.
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	3.654.282.000	3.544.282.000	-110.000.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	368.346.000	361.023.000	-7.323.000	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	28	28	89.115.000	78.498.000	-10.617.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	5	5	3.000.000	1.500.000	0	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	265.841.000	264.495.000	-1.346.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	11.890.000	16.530.000	4.640.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100,00	100,00	296.170.000	270.681.720	-25.515.280	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase tersedianya Dokumen RPPLH	%	100	100	200.170.000	180.596.720	-19.600.280	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	200.170.000	180.596.720	-19.600.280	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Dokumen KLHS	%	100	100	96.000.000	90.085.000	-5.915.000	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	dokumen	1	1	96.000.000	90.085.000	-5.915.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	826.387.200	808.784.550	-17.602.650	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	76,78	76,78				
		Indeks Kualitas Air	nilai	75,85	75,85				
		Indeks Kualitas Udara	nilai	84,92	84,92				

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Indeks Kualitas Lahan	nilai	63,32	63,32				
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan LH	%	100	100	826.387.200	808.784.550	-17.602.650	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dokumen	2	2	251.687.200	248.381.400	-3.305.800	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	1	1	25.00.000	16.046.800	-8.953.200	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim	laporan	1	1	150.000.000	141.296.050	-8.703.950	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	2	2	399.700.000	403.060.300	3.360.300	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100,00	100,00	90.000.000	80.955.000	-9.045.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Kehati	%	100	100	90.000.000	80.955.000	-9.045.000	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	1	90.000.000	80.955.000	-9.045.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)	Persentase Pengendalian B3 & LB3	%	100,00	100,00	30.000.000	21.023.100	-8.976.900	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan sementara LB3	%	100	100	30.000.000	21.023.100	-8.976.900	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	1	1	30.000.000	21.023.100	-8.976.900	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100,00	100,00	24.975.000	14.167.500	-10.807.500	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	28,00	28,00				
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100	100	24.975.000	14.167.500	-10.807.500	

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	25	25	24.975.000	14.167.500	-10.807.500	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100,00	100,00	377.973.000	297.373.100	-80.599.900	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100	100	377.973.000	297.373.100	-80.599.900	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	dokumen	6	6	126.588.000	93.779.600	-32.808.400	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	500	500	54.725.000	43.241.500	-11.483.500	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan	lembaga	4	4	196.660.000	160.352.000	-36.308.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kompetensinya terkait PPLH							
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100,00	100,00	5.025.000	3.025.000	-2.000.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	%	100	100	5.025.000	5.025.000	-2.000.000	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	pengaduan	10	10	5.025.000	3.025.000	-2.000.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut	%	82,00	82,00	7.883.532.000	12.627.022.000	4.743.490	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	75,00	75,00				
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	24	24	7.883.532.000	12.627.022.000	4.743.490	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	4	4	460.000.000	309.299.000	-150.701.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	5	5	930.000.000	5.635.600.000	4.705.600.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.

Kode rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target		Anggaran		Selisih (Rp)	Alasan Perubahan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen	2	2	420.000.000	404.191.000	-15.809.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	85000	85000	6.073.532.000	6.277.932.000	204.400.000	Adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang harus diakomodasi.
						28.982.328.200	33.364.617.200		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2025 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil DLH Kabupaten Pemalang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang lingkungan hidup sebagai implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah;

Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal dan mencapai tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.

Pada akhir tahun anggaran 2025 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Pemalang, Juni 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina Tk.I
NIP. 19700131 199303 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 28, Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 322121, Laman www.dlh.pemalangkab.go.id
Surel : klh_pemalangkab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : / /DLH/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam tahapan persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja, perangkat daerah membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja; dan
 - b. merumuskan dan Menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



WIJI MULYATI, S.K.M
Pembina Tk.I
NIP. 19700131 199303 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui;
2. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : / /DLH/2025
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
5.	Kasubag. Bina Program dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
6.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
7.	Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
8.	Kepala Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
9.	Kasubag. TU Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
10	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Umar Sidik, S.IP
12.	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Inayati Ainah, S.Si
13.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Siamatun, S.H
14.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Agus Aribowo, S.T
15.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Riyani Anggarini, S.T
16.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Salasatun Atminingtyas, S.T

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
17.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Elvira Astriana Sari, S.T
18.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Redina Restiani, S.T
19.	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Andika Bimaseta, S.T
20.	Pranata Komputer pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Fikfik Victor A, A.Md
21.	Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Koriyah, A.Md

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



WIJI MULYATI, S.K.M

Pembina Tk.I

NIP. 19700131 199303 2 003